TARGET — Kabupaten PALI menargetkan vaksinasi terhadap 1.335 orang Tenaga Kesehatan (Nakes) ditargetkan selesai 10 hari kedepan.

677 Ibu Rumah Tangga Musi Banyuasin Menjanda

● Marak Istri Gugat Cerai Suami

SEKAYU, SRIPO — Masa pandemi Covid-19 dalam setahun belakangan menambah satu lagi permasalahan sosial di masyarakat, salah satunya perceraian. Pengadilan Agama Sekayu sendiri mencatat selama masa pandemi angka perceraian meningkat sebanyak 20 persen. Bahkan dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 787 perkara, sebanyak 570 istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya dan berani mengambil resiko menjanda (single parent), sedangkan suami yang menggukan cerai talak hanya 113 perkara. Dari total jumlah itu, selama 2020 Pengadilan Agama (PA) Sekayu sudah memutuskan baik cerai gugat maupun cerai talak sebanyak 677 perkara.

Hal ini tak lain disebabkan faktor perekonomian yang mantica retakanya rumah tangga dan harus berakhir pada perceraian. Seperti diungkapkan kepala Pengadilan Agama (PA) Sekayu Korik Agustian SAg, MAg saat ditemui sripo di ruang kerjanya usai acara Live Talk di Sumsel Virtual Fest 2021 di Youtube Channel Sripoku.Tv dan Live Facebook (Fb) Sriwijaya Post, Kamis (4/2/2021).

> Tahun ini ada sekitar 20 persen. Paling banyak kasus cerai gugat dan cerai talak. Untuk cerai gugat kami putus 568 perkara, tinggal 2 perkara lagi. Sedangkan cerai talak ada 109 perkara yang sudah kami putus sisanya 4 perkara

Korik Agustian SAg, MAg
kepala Pengadilan Agama (PA) Sekayu

Korik menjelaskan, selama pandemi banyak sekali masyarakat yang mengajukan perceraian dipicu sulitnya ekonomi. "Faktor ini tak lain karena daya beli menurun, terjadinya PHK, krisis pendapatan yang berdampak dalam kehidupan berumah tangga," ujarnya.

Dirinatis karena kurangnya dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah anak yang sekolah, maka faktor ekonomi menjadi penunjang adanya perceraian. "Untuk tahun 2020 kemarin, Pengadilan Agama Sekayu mencatat faktor perekonomian ini berada di urutan ketiga, yakni sebanyak 34 perkara. Jelas ini menunjukkan menyusutnya perekonomian akibat pandemi sangat berdampak dalam kehidupan berumah tangga. Efek dari kondisi ini, memicu perselisihan atau pertengkaran sehingga yang berujung perceraian. Posisi perselisihan ini berada di rankling pertama dengan 523 perkara," jelas Korik.

Namun tetap saja yang paling banyak adalah faktor perselisihan atau pertengkaran. Faktor pertengkaran ini dipicu dari permasalahan sepele seperti tidak puas dengan pelayanan istri, tidak nyaman tinggal serumah dengan mertua, perbedaan adat istiadat, ada juga faktor orang ketiga, dan sebagainya. "Padahal jika dari awal bisa dikomprominkan dan tidak akan berujung pada perpisahan. Apalagi faktor ekonomi, disamalah kitamanan kita diuji," terangnya.

Menurutnya, faktor ekonomi ini harus menjadi perhatian serius dan perlu pendewasaan bersikap sabar tidak cepat mengambil keputusan. "Tidak mungkin orang yang sudah menikah itu tak ter cinta saja, mungkin selama pacaran oke-lah, tapi mereka belum tahu bagaimana kehidupan rumah tangga itu. Makanya kita harus merasa cukup dan senantiasa bersyukur," ungkap Korik.

Terlepas dari itu semua, faktor yang paling penting adalah kepercayaan kepada suami. Jika pasangan suami istri memiliki hati yang teguh dan iman yang kiat, pasti bisa mempertahankan ketulitan berumah tangga di tengah keterbatasan ekonomi. "Kalau terbiasa peningkatan, tahun ini ada sekitar 20 persen. Paling banyak kasus cerai gugat dan cerai talak. Untuk cerai gugat kami putus 568 perkara, tinggal 2 perkara lagi. Sedangkan cerai talak ada 109 perkara yang sudah kami putus sisanya 4 perkara," jelas Korik.

Dari data tersebut, diketahui mayoritas dari perempuan atau pihak istri yang banyak mengajukan perceraian. Karena yang bermasalah ini dari pihak suami karena dirilai tidak bertanggung jawab soal nafkah dan pihak istri merasa dirugikan.

"Imbauan kepada masyarakat kita terutama yang muslim sebelum mengajukan perceraian kami harapkan untuk memintu masukan atau nasihat kepada orangtua atau kepada alim ulama dan tokoh masyarakat untuk meminta masukan. Supaya nanti jangan sampai menyesal. Jadi kalau beubbetil kalau sudah menang tidak tahan lagi pertimbangannya damai, kalau menang sulit ya harus," ujarnya. (dbo)

Perlu Upaya Merawat Cinta

Hj Ulwiatun Hasanah

DOKTOR Hj Ulwiatun Hasanah MAg yang juga hadir sebagai pembicara mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Terlebih dirinya dari sebagai Direktur Sakina Center Kota Palembang dan Direktur Daerah LP2KS BKPRMI terus berupaya untuk menjaga pasangan rumah tangga meniaja keterstrainan (sakinah). Untuk itu, ia menekankan cinta perlu dirawat tidak hanya sebelum pernikahan tetapi pasca pernikahan perlu dirawat. "Caranya banyak, seperti menjeduakan waktu untuk berusama dalam keluarga. Suami melaksanakan kewajibannya dan istripun berusaha untuk menyenangkan suami. Mulai dari penampilan, mengurus rumah tangga, hingga kepada pemoalan makanan suami dan menjaga harga suami," katanya.

"Termasuk menyapa pasangan dengan panggilan yang lebih kepada menimbulkan kasih sayang dan kemesraan, seperti Rasulullah menyapa istrinya dengan Humairah. Visualasi harus dicintuh sehingga bisa menimbulkan chemistry antar kedua pasangan. Terkadang kemesraan hanya dibutuhkan sebelum menikah, setelah menikah sudah tidak lagi dirawat. Padahal, cinta perlu perawatan, termasuk juga penampilan istri sehingga begitu suami memandang wajah senang. Nah merawat cinta ini langkah menuju keluarga sakinah karena hati seseorang cepat sekali berubah," kata Uswatun Hasanah, yang juga dosen UIN Raden Fatah Palembang.

Sementara pembicara lain Dosen Sekolah Fiqih, Rumah Fiqih Indonesia Sf Sayid Mahadir Le, MAg berpendapat pernikahan yang dilakukan dua insan manusia yang berbeda jenis diikat dengan ikatan yang mulia. Untuk itu sejatinya, kedua pasangan harus menjaga dan merawat agar tidak terlepas hingga kematian yang memisahkannya. "Memang pernoalan suatu yang dihindakan, tetapi paling ditinci Allah SWT. Makanya, saya coba dengan prinsip di Pengadilan Agama yang menerima perkara perceraian tetapi tidak mudah untuk memutuskan perceraian. Karena ada tahapan mediasi. Jadi saya pikir, pernikahan memang harus dijaga," katanya. (dbo)

Ratusan Konsumen Perumahan Syariah Tertipu

Wako Minta Warga tak Tergiur Program Menyejukan

SAAT ini ratusan tangi di Kota Lubuklinggau Sumatra Selatan (Sumsel) dengan berbagai latar belakang tertipu embel-embel perumahan syariah. Pengembang Perumahan PT Buroq Nur Syariah (BNS) yang berlokasi di Jl HM Soeharto Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini, diduga lebih dari seratus konsumen yang sudah membayar uang muka (DP) ratusanan. Tetapi hingga saat ini sebanyak 430 konsumen di Kota Lubuklinggau tertipu dengan beragam hingga mencapai miliaran rupiah.

Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya-upaya hukum agar bisa ditindaklanjuti.

"Silahkan masyarakat melakukan upaya hukum, agar cepat ditindaklanjuti diketmadian hari," kata wali kota yang biasa di panggil Nanan ini. Kamis (4/2/2021).

Nanan pun meminta kepada masyarakat yang dirugikan jangan melakukan perbuatan melanggar hukum. Biarlah peneggak hukum yang akan melakukan upaya hukum selanjutanya karena saat ini pelaku pengembang perumahan berlabel syariah ini statusnya sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Sumsel. "Informasi yang saya dengar sudah ada DPO (pengembang perumahan) dari Polresta, biarlah peneggak hukum yang menindak lanjutinya nanti," ujarnya.

Dikatakan, saat proses pembangunan perumahan, Nanan mengaku bersama Forkopimda pernah berkunjung dan melihat pembangunan perumahan tersebut. "Karena bagi saya (Walikota), semua investor pasti akan kita terima, cuman, bagaimana kita harus batobati saja, bila bermasalah pemerintah tidak akan mengeluarkan izin," katanya.

Kedepan Nanan mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah terlena dengan program-program bombastis yang bisa merugikan masyarakat.

"Intinya masyarakat harus hati-hati, lewat program-program menggiurkan dan menyejukkan, ya kita minta harus hati-hati," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan emak-emak mendatangi Polres Lubuklinggau untuk melaporkan Perumahan PT Buroq Nur Syariah (BNS) karena telah melakukan penipuan. Veni Wulandari, salah salah satu korban mengaku, tertarik menggambil perumahan syariah tersebut karena embel-embel yang ditawarkan tanpa riba dengan marketing bombastis. "Awal tertarik karena berdasarkan slogan dan baner iklan perbangunannya tanpa riba dan bank, akhirnya saya tertarik, karena kalau pakai bank sangat ribet," ungkapnya pada wartawan di Polres Lubuklinggau, Rabu (3/2/2021).

Ditambah saat itu wali kota Lubuklinggau bersama forkopimda pernah berkunjung melihat progres pembangunannya, sehingga membuat mereka (konsumen) yakin bahwa perumahaan itu bukan berkedok penipuan.

"Wali kota juga pernah berkunjung kesana, yang paling meroleat kami tertarik karena tidak melalui bank itu, karena pakai bank itu ribet, bahkan menurut Prita (pengembang perumahan) persen-izin IMB lagi di urus," ujarnya.

Akhirnya setelah satu bulan melakukan survei dan diyakinkan oleh pengembang Prita, Veni pun sepakat mengambil rumah tipe 48 dengan down payment (DP) sebesar Rp19 Juta dengan sistem cicil sebanyak tiga kali. "Awal sebesar Rp. 9 juta, lalu DP lagi Rp.5 juta kemudian terakhir Rp 9 juta jadi total Rp. 29 juta ngambil tipe 48," ungkapnya.

Veni menginngkapkan, sejak melunasi DP awalnya tidak merasakan kecurigaan sama sekali, karena saat itu progres pembangunan sedang berjalan. Namun ternyata yang dibangun bukan blok yang Veni melatirkan blok lain. "Ternyata yang di bangunbangun itu Pale, sedangkan kami itu blok Bilal dan saya C 12, ternyata setelah saya tanya baru tahap penggusuran, luas tanahnya saat itu tercapai 1 hektare," ujarnya.

Kemudian memasuki bulan Agustus tahun 2020 rumah yang Veni pilih pun mulai dibangun dan mulai memasang bata. Saat itusee itu Veni sempat bertanya kepada Tia (marketing perumahan) kira-kira kapan selesai rumahnya dibangun.

"Katanya bulan 12 akhir tahun, setelah bulan 12, batanya naik (bangun). Tapi baru setengah, lemis saya tanya, alasan Tia (Marketing) saat itu karena tutup buku akhirnya dipending bulan Januari," ungkapnya.

Ketika memasuki bulan 12 Veni bertanya kembali dengan Tia kira-kira lebaran 2021 mendatang apakah rumah yang Veni pesan selesai atau belum. Namun saat itu Tia merspon belum tahu. "Kemudian saya ngasuk bulan kemaren ternyata saya kaget, belum ada pembangunan lanjutan sama sekali, rumahnya sudah tergali dan pondasinya sudah ada tapi atap dengan lantainya belum," ujarnya. (jar/bo)

Kegiatan Seismik Tanah Abang Tuai Masalah

PALI, SRIPO — Kegiatan survei seismik 3D dalam upaya pencarian cadangan Migas di bawah permukaan bumi menggunakan gelombang seismik dalam rangka eksplorasi daerah prospek hidrokarbon (minyak dan gas bumi) di beberapa desa dalam wilayah kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memuai masalah. Pasalnya, sejumlah warga mengaku tidak pernah menerima informasi dari pihak perusahaan, baik itu berapa nominal ganti rugi lahan yang dilalui maupun kapan pembayarannya.

Eko (37), salah seorang warga Tanah Abang Selatan pemilik lahan yang dilalui kegiatan seismik mengaku bahwa bentangan kabel seismik yang berada dalam kebun karetnya tanpa sepengetahuannya. "Dari awal saya tidak pernah dibubungi pihak perusahaan. Setelah ada bentangan kabel yang rencananya akan menembak, baru ada pihak yang mengaku dari perusahaan yang mensilpon bahwa harga lahan yang dilintasi per meter hanya Rp 5.000. Tentu saya terkejut dan tidak setuju," ungkap Eko, Kamis (4/2/2021). "Kami meminta pihak perusahaan untuk menggulung kembali kabel yang sudah terbentang di lahan kami" ujarnya menambahkan.

Menurutnya, bukan hanya dirinya yang tidak pernah dihubungi pihak perusahaan, namun ada beberapa warga lainnya juga alami hal sama. "Informasinya pihak perusahaan sosialisasi ke pihak desa, tapi pihak desa tidak pernah memberi tahu kami sebagai pemilik lahan. Tentu saja atas kurangnya sosialisasi itu, saya tidak setuju dengan harga hanya Rp 5.000/meter," jelasnya.

Sementara, Efriansyah (30) warga desa persiapan Tanah Abang Barat yang rumahnya alami retak-retak pasca adanya perembakan dinamit dari aktivitas seismik.

"Banyak retakan di rumah kami. Sempat ada dua perwakilan dari perusahaan mengecek rumah kami, tapi kapan ganti rugi diberikan dan berbentuk apa kami belum mengetahuinya," jelasnya.

"Kami berharap, ganti rugi sesuai dengan kerusakan. Apabila sampai kegiatan seismik rampung dan ganti rugi tidak dilakukan maka kami akan menempuh jalur hukum," ujarnya lagi.

Dikonfirmasi ke salah seorang Humas PT BGP selaku Sub Kontraktor Seismik, Senar mengatakan, untuk permasalahan rumah retak ada bagian humas lainnya yang menangani, sementara dirinya hanya bagian humas untuk permasalahan lahan. "Kalau ada warga pemilik lahan yang mempermasalahkan, maka akan kami data apa masalahnya," kata dia. (cr2)

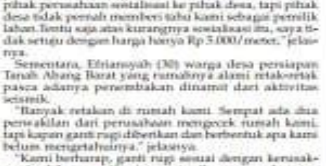

PEMILIK LAHAN — Salah seorang warga Tanah Abang Kabupaten PALI menunjukkan lahan miliknya yang dilintasi kegiatan Seismik.

Proyek Tujuh Jalan Diperiksa Tim BPK

BANYUASIN, SRIPO — Pelaksanaan pembangunan jalan poros Desa Mulya Agung menuju Desa Tanjung Mulia Nenang yang merupakan jalan akses menuju Kota Kabupaten Pangkalan Balai Banyuasin, dinilai mendukung perekonomian masyarakat, Kamis (4/2/2021). Jalan poros ini, merupakan tujuh dari proyek jalan yang saat ini dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dibangun jalan poros pengbubung desa ke Kota Kabupaten, tentunya membuat masyarakat mudah melakukan akses keluar masuk membawa hasil kebun ke pasar," kata Sekretaris Desa Suka Mulya Firmansyah.

Diakuinya, sebelum dibangun jalan poros tersebut masyarakat sangat sulit untuk berpergian, lantaran jalan becek dan berlumpur. Namun Sekdes ini begitu paham jika proyek jalan dalam pengawasan dan pemeriksaan auditor BPK. Terpisah Kadis PU Tata Ruang Banyuasin Ir Ardi mengatakan, tujuh proyek pembangunan jalan poros sudah 100 persen selesai dikerjakan. Namun demikian, masih ada pembahasan yang berjalan tersisa sekitar 5 persen dari kontrak, dan akan dibayarkan 1 tahun dari penyerahan terakhir. Secara fisik semua kegiatan telah selesai dengan cukup baik dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuh jalan poros yang dibangun Pemkab Banyuasin tersebut mencakup jalan poros Desa Lubuk Karet, Teja Raya II dan Teja Mulya Kecamatan Betung sepanjang 12 Km. Kemudian, jalan poros Muara Padang, Muara Sugihan Kecamatan Muara Padang sepanjang 23 Km. Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Banyuasin 3 Air Saleh Pramuhan Jalur 10 sepanjang 10 Km. Kemudian, jalan poros Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau sepanjang 18,11 Km. Pengecoran Jalan sepanjang 3,50 Km, pengecoran jalan Poros Sungai Dua Prajen Kecamatan Rambutan sepanjang 3,50 Km, pengecoran jalan Poros Sukamulya. Karang Petai Kecamatan Banyuasin III sepanjang 10,742 Km dan pengecoran jalan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa sepanjang 3,565 Km. (mbd)

Siapkan Aplikasi Aduan Jalan Rusak

SEKAYU, SRIPO — Sering terkendalanya masyarakat umum untuk melaporkan jalan rusak di Kabupaten Muai Banyuasin (Mubai) membuat masyarakat sering mengeluh karena tidak ada perbaikan. Menjawab persoalan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muba, meluncurkan aplikasi Sistem Pelaporan Jalan Rusak atau Geografis Information Sistem (GIS), Kamis (4/2/21).

Kepala Dinas PU PR Muba, Herman Mayori ST, MT mengatakan, diluncurkannya aplikasi pengaduan jalan rusak untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan mengenai kondisi jalan rusak di seluruh Kabupaten Muba. "Aplikasi ini untuk mengbubungi Dinas PU PR Muba untuk memberikan mengenai jalan rusak yang ada di Kabupaten Muba. Masyarakat bisa aplikasi untuk mengbubungi Dinas PU PR Mubauntuk memberitahu mengenai jalan rusak yang ada di Kabupaten Muba," katanya.

Aplikasi ini dalam tahap persiapan dan akan segera bisa diunduh menggunakan gawai masing-masing.

"Sebentar lagi akan kita luncurkan aplikasi ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Untuk perbaikan kita lakukan secara bertahap karena keterbatasan alat berat yang kita miliki," katanya. (dbo)